

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR DISTRIK NABIRE

LUSDEN SAMOSIR

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Satya Wiyata Mandala

lusedensamosir67@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menerapkan Good Governance tentunya Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Kantor Distrik Nabire harus mampu memiliki kinerja yang maksimal terutama dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang diberikan kepada masyarakat, pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi menjadi tolak ukur terhadap kemampuan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Distrik Nabire dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan beban kerja yang dimiliki.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk menganalisis apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik Nabire, 2). Untuk menganalisis apakah akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik Nabire dan 3). Untuk menganalisis variabel mana yang paling dominan memiliki pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik Nabire, dimana jenis penelitian ini yaitu Penelitian Asosiatif dengan jumlah sampel sebanyak 53 responden yaitu ASN di Kantor Distrik Nabire, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan formula statistik Chi-Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja yaitu sebesar 0,036 dan variabel transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja sebesar 0,021, oleh karena itu ASN di Kantor Distrik Nabire dalam menjalankan tugas perlu memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi.

Keyword : Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja.

ABSTRACT

In implementing Good Governance, of course the Regional Apparatus Organization, in this case the Nabire District Office, must be able to have maximum performance, especially in achieving the minimum service standards provided to the community, the influence of accountability and transparency is a benchmark for the performance capabilities of the State Civil Apparatus (ASN) in the Office Nabire District in carrying out its duties and responsibilities according to the workload it has.

The aims of this research are 1). To analyze whether transparency has an influence on the performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Nabire District, 2). To analyze whether accountability has an influence on the performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Nabire District and 3). To analyze which variable has the most dominant influence on the performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Nabire District, where this type of research is associative research with a total sample of 53 respondents, namely ASN in the Nabire District Office, the data analysis technique used is using a statistical formula Chi-Square.

The results of the study show that the accountability variable has an effect on performance of 0.036 and the transparency variable has an effect on performance of 0.021, therefore civil servants in the Nabire District Office in carrying out their duties need to pay attention to aspects of accountability and transparency.

Keyword : Accountability, Transparency and Performance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemerintah baik pusat maupun daerah demi mewujudkan pemerintahan yang baik terhadap tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang susah untuk dilakukan namun inilah yang dituntut oleh birokrasi di pemerintahan untuk dapat transparan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara dekat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tentunya kemampuan dalam melayani menjadi prioritas bagi pegawai untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Distrik Nabire, dalam melaksanakan tugasnya harus mampu secara akuntabel dan transparan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002 : 20), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Selain itu aspek transparansi menjadi faktor yang perlu untuk dapat dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana menurut Krina (2012 : 133) transparansi yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil - hasil yang dicapai.

Faktor Akuntabilitas dan Transparansi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Distrik Nabire, menjadi tolak ukur terhadap peningkatan kinerja, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena akuntabilitas dalam bekerja diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dalam menjalankan tugas dan aktivitas sebagai rutinitasnya setiap hari. Selain itu juga transparansi sebagai faktor yang perlu untuk diperhatikan karena sebagai pelayan masyarakat dalam menjalankan tugas maka pihak Distrik Nabire, dapat terbuka kepada publik terhadap informasi maupun prosedur pelayanan yang terkait dengan kebutuhan pelayanan administrasi.

B. Hipotesis.

Menurut Sugiyono (2003 : 70), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀ : Variabel Akuntabilitas dan Transparansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja.

H₁ : Variabel Akuntabilitas dan Transparansi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Distrik Nabire
2. Untuk menganalisis apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Distrik Nabire.
3. Untuk menganalisis variabel mana yang paling dominan memiliki pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Distrik Nabire.

KERANGKA TEORI

A. Akuntabilitas.

Indikator Akuntabilitas menurut Loina Lalolo Krina P, (2003), dibagi menjadi lima yaitu :

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Menurut Akbar (2012), mengatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) secara harafiah dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Menurut Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni : 1). *accountability for probity and legality*; 2). *process Accountability*; 3). *performance Accountability*; 4) *programme Accountability*; dan 5) *policy Accountability*.

Menurut Annisaningrum (2010:1), mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggung jawaban.

B. Transparansi.

Menurut Coryanata (2007), mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8), meliputi 2 aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Menurut Werimon (2007:8), menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

C. Kinerja.

Menurut Indra (2006: 275), pengukuran kinerja adalah pencapaian kinerja manajemen. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik. Sehingga upaya perbaikan secara terus - menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Menurut Afandi (2018 : 89), indikator-indikator kinerja pegawai adalah :

1) Kuantitas hasil kerja.

Segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya.

2) Kualitas hasil kerja.

Segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan kualitas atau mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya.

3) Efisiensi dalam melaksanakan tugas.

Berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya.

4) Disiplin kerja.

Taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku .

5) Inisiatif.

Kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit.

6) Ketelitian.

Tingkat kesesuaian hasil pengukuran kerja apakah kerja itu udah mencapai tujuan apa belum.

7) Kepemimpinan.

Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

8) Kejujuran.

Salah satu sifat manusia yang cukup sulit untuk diterapkan.

9) Kreativitas.

Proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau yang melibatkan pemunculan gagasan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yakni kuantitatif, dimana yang digunakan adalah Penelitian Asosiatif. Menurut Sugiyono (2014 : 53), Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

B. Populasi.

Menurut Sudjana (2010 : 6) populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil yang menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat - sifatnya. Oleh karena itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik Nabire berjumlah 53 orang pegawai.

C. Sampel.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampel total, dimana menurut Sugiyono (2007), total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi, dimana jika jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian, oleh karena itu dimana jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik Nabire, berjumlah 53 orang maka seluruhnya dijadikan sampel dalam penelitian.

D. Sumber Data.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder dimana 1). sumber data primer yang penulis butuhkan bersumber dari observasi atau pengamatan secara langsung objek penelitian, wawancara terhadap sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang dilakukan dan pembagian kuesioner kepada responden yang menjadi target dalam penelitian dan 2). sumber data sekunder yang penulis peroleh bersumber dari catatan - catatan, dokumen dan file yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini lebih cenderung menggunakan data kategorik berupa pernyataan informan dan responden berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi, maka penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan Metode analisis Tabel silang (*cross tabulation*)

Bentuk formula yang digunakan untuk melakukan analisis data yaitu, dengan menggunakan pendekatan analisis data kategorik Chi-Square (chi kuadrat) dengan rumus sebagai berikut:

$$\sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

X = Nilai Chi-Kuadrat

Fo = Frekuensi Observasi

Fh = Frekuensi Harapan

Diperlukan harga - harga:

Db (derajat bebas) = (b-1)(k-1) = (3-1)(2-1) = 2

Nilai Chi-square hitung = (154,22)

Nilai chi-square table= dengan $\alpha = 5\% = 5,99$

(ketentuan pilihan alfa (α) ilmu sosial umumnya menggunakan 5%).

Bila Chi square hit > chi square tab ($\alpha=5\%$) = hipotesis H_0 diterima, artinya ada hubungan data kategorik diatas, bahwa dimensi Akuntabilitas dan Transparansi berhubungan dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Distrik Nabire.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Chi Square Indikator Akuntabilitas terhadap Indikator Kinerja.

Hasil dari Crosstab tentang pengaruh variabel bebas yakni Indikator akuntabilitas terhadap Indikator Kinerja disajikan pada hasil di tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.

Hasil Crosstab Indikator Akuntabilitas terhadap Indikator kinerja.

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	248.244 ^a	210	0.036
Likelihood Ratio	154.874	210	0.998
Linear-by-Linear Association	0.392	1	0.531
N of Valid Cases	53		
a. 240 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.			

Sumber Data : Olahan Data Primer dan Data Sekunder Tahun 2021.

Pada Tabel 1, di atas tentang Hasil Crosstab Indikator Akuntabilitas terhadap Indikator kinerja menunjukkan bahwa H_0 diterima yaitu Variabel Akuntabilitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Kinerja yaitu dimana nilai *Asymptotic Significance (2-sided)* memiliki Nilai 0,036 yang artinya nilai Asymp Sig lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$) hal ini berarti Variabel akuntabilitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan menyajikan, pertanggung jawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap aspek kinerja Kepala Distrik dalam menjalankan tugas sebagai Pemimpin, karena seorang pemimpin tentunya dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap tumbuh dan suksesnya instansi yang dipimpinnya sehingga hasil kinerja dari seorang pemimpin dapat dinilai dari aspek akuntabilitas yang dimilikinya, akan tetapi kondisi yang terjadi di Distrik Nabire, dimana akuntabilitas kinerja pimpinan masih sangat kurang maksimal karena pimpinan memiliki tugas pekerjaan tambahan sehingga terkadang kurang fokus berada di tempat kerja. Sehingga terdapat pekerjaan yang memerlukan pengambilan keputusan tertunda karena pimpinan tidak berada di tempat kerja (kantor), selain itu juga kurang fokusnya pimpinan terhadap pelayanan secara publik yang mana masyarakat sangat sulit bertemu dengan Kepala Distrik untuk keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam kebutuhan pelayanan administrasi publik.

B. Chi Square Indikator Transparansi terhadap Indikator Kinerja.

Hasil dari Crosstab tentang pengaruh variabel bebas yakni Indikator transparansi terhadap Indikator Kinerja disajikan pada hasil di tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.

Hasil Crosstab Indikator Transparansi terhadap Indikator kinerja.

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	253.802 ^a	210	0.021
Likelihood Ratio	158.806	210	0.997
Linear-by-Linear Association	1.520	1	0.218
N of Valid Cases	53		
a. 240 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.			

Sumber Data : Olahan Data Primer dan Data Sekunder Tahun 2021.

Pada Tabel 2, diatas tentang Hasil Crosstab Indikator Transparansi terhadap Indikator kinerja menunjukkan bahwa H_0 diterima yaitu Variabel Transparansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Kinerja yaitu dimana nilai *Asymptotic Significance (2-sided)* memiliki Nilai 0,021 yang artinya nilai Asymp Sig lebih kecil dari 0,05 ($0,021 < 0,05$) hal ini berarti Variabel Transparansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja.

Menurut Mardiasmo (2009), Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek Transparansi memiliki pengaruh terhadap aspek kinerja Kepala Distrik Nabire, dimana reformasi birokrasi menjadi tolak ukur bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat melakukan upaya pembaharuan menuju *Good Governance* salah satunya yaitu aspek transparansi. Dimana keterbukaan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi modal menciptakan *Good Governance* terutama di Kantor Distrik Nabire, dimana nampak bahwa aspek transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja Kepala Distrik Nabire, masih kurang maksimal diterapkan karena keterbukaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dimiliki dan juga kurangnya hubungan komunikasi yang dibangun terutama kepada bawahannya belum maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dimana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Distrik

Nabire, dengan nilai AsimpSig sebesar 0,036, yang mana Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

2. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor Distrik Nabire dengan nilai AsimpSig sebesar 0,021, dimana Aparatur Sipil Negara pada Kantor Distrik Nabire dalam bekerja menjalankan tugas diperlukan transparansi agar dapat menciptakan kepercayaan dalam bekerja.
3. Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja yaitu variabel Transparansi dengan nilai AsimpSig sebesar 0,021, ini berarti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat meningkat dikarenakan dalam bekerja dibutuhkan adanya transparansi untuk setiap kegiatan dan program kerja.

Saran.

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pokok kajian dalam Tesis ini, untuk dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait sebagai berikut :

4. Aspek akuntabilitas di Kantor Distrik Nabire perlu untuk ditata dengan baik terutama dalam ketersediaan laporan pertanggung jawaban dari setiap kegiatan program kerja yang dimiliki dan melakukan pengarsipan terhadap Laporan Pertanggung jawaban yang terkait dengan rutinitas yang menjadi tanggung jawab Kantor Distrik Nabire seperti LAKIP, Renstra, Standar Pelayanan Minimal hingga data tentang Distrik Nabire dalam Angka yang akurat sesuai dengan kondisi ter-update.
5. Pihak kantor Distrik Nabire dalam Aspek transparansi perlu dilakukan secara terbuka dan objektif agar tidak ada kecurigaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, oleh karena itu perlu adanya papan informasi untuk dapat memberi informasi yang terbaru yang dimiliki dalam setiap kegiatan - kegiatan dan juga prosedur pelayanan administrasi yang harus dilengkapi masyarakat sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.
6. Perlu adanya kesadaran dan profesional dalam melaksanakan tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pimpinan hingga bawahan, terutama dalam

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga mampu memberikan kepuasan dan penilaian yang positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Distrik Nabire.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori, Konsep dan Indikator, Edisi 1, Ed, Zanafa, Pekanbaru.
- Akbar, B, 2012, *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Artikel. Fordfoundation*. Public Interest Research and Advocacy Center.
- Annisaningrum, 2010, Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. (Online).<http://ovy19.wordpress.com>, diakses 5 Maret 2021.
- Coryanata, Isma, 2007, *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas, Makasar.
- Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Erlangga, Jakarta, Erlangga, Jakarta.
- Loina Lalolo Krina P, 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sudjana, 2010, Metode Statistika, Tarsito, Bandung.
- Sugiyono, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*, CV. Assa, Bandung.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.